



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah suatu kegiatan penarikan dana dari penghasilan seseorang maupun badan yang bersifat memaksa. Walaupun demikian, pajak memiliki kegunaan yang sangat baik untuk negara seperti pembangunan negara, sarana prasarana negara yang secara tidak langsung kita dapat menikmati hasil dari pembayaran pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membantu pemerintah meningkatkan pembangunan nasional (fungsi budgetair). Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulierend).

Dari pemungutannya, pajak dibagi atas 2 lembaga pemungutan yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Diantaranya PPh, PPN/PPn, BM, PBB, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tk. I, maupun pemerintah daerah Tk. II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah di tentukan oleh pemerintah daerah (Perda).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai Pengeluaran Negara baik Pengeluaran Rutin maupun Pengeluaran Pembangunan. Di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak cukup besar peranannya, lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari 70% total Penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan. (Prihatmi, 2013). Oleh sebab itu, penyelenggaraan pajak akan lebih berguna dan berhasil, manakala dibarengi dengan kemampuan yang kuat dari daerah dalam mengembangkan atau meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan rumah tangganya sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mencapai kemandirian keuangan daerah.

Kota Bekasi adalah salah satu Kota industri yang sedang diminati oleh investor yang dikarenakan kota yang termasuk dalam kota yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Perekonomian Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Pada awalnya pusat pertokoan di Bekasi hanya berkembang di sepanjang jalan Ir. H. Juanda yang membujur sepanjang 3 km dari alun-alun kota hingga [terminal](#) Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokoan yang dibangun sejak tahun 1978.

Selanjutnya sejak tahun 1993, kawasan sepanjang Jl. Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan seiring dengan munculnya beberapa [mal](#) serta sentra niaga. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan K. H. Noer Ali ([Kalimalang](#)), [Kranji](#), dan Kota Harapan Indah. Selain itu keberadaan kawasan industri di kota ini, juga menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama. Lokasi industri di Kota Bekasi terdapat di kawasan [Rawa Lumbu](#) dan [Medan Satria](#).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selalu di atas Jawa Barat dan Indonesia. Pada tahun [2004](#) ekonomi Kota Bekasi tumbuh 5,38% dan pertumbuhan ini lebih tinggi dari [Jawa Barat](#) (4,77%) tetapi di bawah LPE



Indonesia yang mencapai 5,50%. Pada tahun 2005 dengan 5,65%, LPE Kota Bekasi sedikit lebih tinggi dari Jawa Barat dan Indonesia dengan 5,62% dan 5,55%. Demikian pula pada tahun 2006, LPE Kota Bekasi yang mencapai 6,07% masih lebih baik dibandingkan Jawa Barat dan Indonesia yang hanya mencapai 6,01% dan 5,48%.
(id.wikipedia.org)

Pada tahun 2010, Kota Harapan Indah yaitu salah satu kota di Wilayah Bekasi juga mengalami perkembangan pesat yang hanya membutuhkan waktu 5 tahun mendirikan tempat pariwisata seperti hotel, restoran, tempat pembelanjaan rumah tangga dan tempat hiburan lainnya. Dan Kota Bekasi pun juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat luar kota.

Di bidang pariwisata, Kota Bekasi dikenal sebagai kota patriot karena Bekasi merupakan daerah perjuangan dan pertahanan Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. Potensi wisata Kota Bekasi tidak terlalu banyak, namun demikian fasilitas yang menunjang pariwisata di Kota Bekasi cukup memadai. Di tahun ini, Kota Bekasi memiliki 4 hotel berbintang dan 19 akomodasi lainnya. Statistik akomodasi menunjukkan bahwa persentase tingkat hunian hotel mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa banyak tamu yang menginap di Kota Bekasi. Pada tahun 2011 memiliki jumlah 135.311 tamu. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan tajam berjumlah 197.914 tamu, tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan menjadi 179.834 tamu. Untuk hotel berbintang di kota Bekasi paling banyak terdapat di Kecamatan Bekasi Selatan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak pertumbuhan sentra bisnis dan meningkatnya berbagai sektor di Kota Bekasi termasuk sektor pariwisata. Hal ini bisa terlihat dari jumlah izin kepariwisataan yang meningkat dari 285 izin ditahun 2012 menjadi izin 369 di tahun 2013. Selain hotel dan usaha

Intitit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepariwisataan lainnya di Kota Bekasi memiliki 8 bioskop yang tersebar di 4 kelurahan Wilayah Kota Bekasi. (bekasikota.bps.go.id)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi akan berusaha menaikkan pemasukan pajak dari sektor restoran. Pajak restoran ditargetkan bisa terealisasi hingga Rp110 miliar atau naik 39% dibandingkan 2013 yang hanya diangka Rp79 miliar. Kepala Dispenda Kota Bekasi Aan Suhanda memaparkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun ini ditarget bisa menembus angka Rp1,041 triliun yang diperoleh dari pajak dan retribusi. Jenis pajak di Kota Bekasi yaitu restoran, hotel, reklame, penerangan jalan umum, parkir, pajak bumi dan bangunan (PBB), air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dari sembilan bidang yang dikenakan pajak, kata dia, tahun ini yang akan ditingkatkan untuk pemasukan adalah pajak restoran. Hal itu didasarkan pada bisnis restoran di Kota Bekasi yang tiap tahun mengalami pertumbuhan sekitar 20% tiap tahun.

"Kami melihat tren pertumbuhan bisnis restoran di Kota Bekasi cukup bagus," papar Aan Suhanda kepada Bisnis.com, Selasa (24/6/2014).

Selain target pada tahun ini, ujar Aan Suhanda, Dispenda Kota Bekasi juga telah memprediksi setoran pajak dari restoran pada 2015 bisa menembus angka Rp126 miliar. Dia memaparkan, bisnis restoran di Bekasi didukung dengan maraknya pertumbuhan mal. Pendirian satu pusat perbelanjaan, menurut Aan, berpeluang untuk membuka bisnis restoran baru yang jumlahnya mencapai belasan unit. Dia mengatakan keberadaan restoran yang menyatu dengan hotel akan dikenakan pajak, adapun restoran dari hotel yang hanya menyediakan menu *breakfast* bebas dari pajak. Kendati pajak restoran terus ditingkatkan supaya bisa mencapai target, Aan mengaku sejumlah restoran kelas menengah kerap telat membayar pajak. Dia menyebut restoran atau rumah makan *middle class* susah untuk



menepati waktu soal pembayaran pajak. Hal itu membuat petugas harus kerja ekstra untuk mengirimkan surat pemberitahuan hingga surat peringatan. (bisnis.com)

Dari BEKASI_DAKTACOM: Rapat Paripurna Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bekasi TA 2016. Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhulmuhammad menyampaikan bahwa sektor pendapatan sebesar ditetapkan sebesar Rp 4.093 Triliun dari anggaran PAD Rp 1.7 Triliun, dana perimbangan Rp 1.5 Triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 845 miliar.

Melihat perkembangan Kota Bekasi yang cukup pesat, dan masalah kontribusi pajak dari beberapa sektorsalah satunya adalah 3 faktor yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang seharusnya berkontribusi baik. Maka peneliti tertarik untuk mengambil topik tentang pajak daerah dengan judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BEKASI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi, dan berapa target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?
2. Apakah terealisasi atau tidak penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?
3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?
4. Berapa target Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?



5. Apakah terrealisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?
6. **B**erapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi dan manakah kontribusi yang paling tinggi antara 3 pajak tersebut?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, permasalahan yang dapat diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan berapa target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?
2. Apakah terrealisasi atau tidak penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?
3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terrealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?
4. **S**ebberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi dan manakah kontribusi yang paling tinggi antara 3 pajak tersebut?

D. Perumusan Masalah

Dari Identifikasi Masalah, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang masih belum jelas teraplikasi dengan baik dan matang dari Pemerintah Kota Bekasi yang membuat pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.
2. Target pajak daerah yang terkadang tidak terrealisasi pada daerah Kota Bekasi.



3. Faktor faktor yang masih belum diketahui yang mungkin menyebabkan penurunan kontribusi terhadap pendapatan pajak oleh Pemerintahan Kota Bekasi.

4. Kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang seharusnya berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan pajak daerah.

E. Batasan Penelitian

Batasan Penelitian yang akan di teliti adalah Pemerintahan Kota Bekasi. Dan data yang akan di teliti oleh peneliti adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sekaligus data pendapatan pajak daerah periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besarnya realisasi penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota bekasi untuk 5 tahun terakhir
2. Untuk membandingkan apakah pemerintah Kota Bekasi sudah memenuhi target penerimaan untuk APBD kota Bekasi
3. Untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Bekasi dan mengetahui juga kontribusi yang paling tinggi dari 3 pajak tersebut.
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap realisasi pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran di Kota Bekasi.
5. Sebagai perbandingan penelitian tahun sebelumnya tentang pajak daerah Kota Bekasi dan mengetahui setiap peningkatan ataupun penurunan yang di alami dari APBD kota bekasi.

G. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti :



1. Sebagai syarat peneliti untuk lulus program S1 Sarjana Ekonomi Institute Bisnis Informatika Kwik Kian Gie.
2. Menjadi bahan pengetahuan dan bertambahnya wawasan peneliti tentang pajak daerah terutama pajak daerah Kota Bekasi
3. Sebagai bahan pengetahuan peneliti tentang kontribusi dari setiap pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di Kota Bekasi

Bagi pembaca:

1. Sebagai bahan perbandingan dan modal dasar pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Sebagai informasi untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kontribusi pajak daerah Kota Bekasi.

Bagi Pemerintah Kota Bekasi:

1. Sebagai masukan dasar dasar pengenaan pajak dalam bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2. Sebagai Perbandingan masukan dari penelitian terdahulu atas Kontribusi Pajak Kota Bekasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.